



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan ridho-Nya jualah, Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dapat disusun sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 disusun sebagai salah satu komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan menciptakan tolok ukur kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sebagai komitmen untuk mencapai sasaran strategis di Tahun 2022, Perubahan Perjanjian Kinerja didukung oleh sumber daya yang dimiliki serta penganggaran yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu melindungi kita semua dalam melaksanakan pembangunan dan kinerja yang telah diperjanjikan sehingga dapat dicapai guna mewujudkan “Masyarakat Bangka Barat yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”.

Muntok, 19 Oktober 2022

BUPATI BANGKA BARAT,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1 - 1
1.2. Landasan Hukum	1 - 2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1 - 3
1.4. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Barat	1 - 4
1.4.1. Kondisi Geografis Daerah	1 - 4
1.4.2. Kondisi Demografi	1 - 6
1.4.3. Kondisi Ekonomi Daerah	1 - 7
1.4.4. Kondisi Sosial Budaya	1 - 13
1.4.5. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah	1 - 17
1.5. Sistematika Penyusunan	1 - 21
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2022.....	2 - 1
2.2. Target Indikator Makro Tahun 2022.....	2 - 2
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	2 - 3
2.4. Target Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.....	2 - 6
2.5. Perubahan APBD Tahun 2022.....	2 - 8
BAB III PENUTUP	
3 - 1	
LAMPIRAN	
- PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022	
- PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat	1 - 6
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bangka Barat per Semester I Tahun 2022.....	1 - 6
Tabel 1.3	Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (persentase)	1 - 8
Tabel 1.4	Kontribusi Sektor terhadap PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021 (persentase)	1 - 10
Tabel 2.1	Perubahan Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 -	2 - 3
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.....	2 - 3
Tabel 2.3	Target Indikator Tujuan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	2 - 6
Tabel 2.4	Target Indikator Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	2 - 7
Tabel 2.5	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	2 - 9
Tabel 2.6	Program Pendukung Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022	2 - 10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bangka Barat	1 - 5
Gambar 1.2	PDRB ADHB, ADHK dan LPE Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021	1 - 7
Gambar 1.3	PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021 (ribu rupiah)	1 - 12
Gambar 1.4	PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 (Juta Rupiah)	1 - 13
Gambar 1.5	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021 (Persentase)	1 - 14
Gambar 1.6	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021 (Tahun)	1 - 14
Gambar 1.7	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021 (Tahun)	1 - 15
Gambar 1.8	Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021 (Tahun)	1 - 16
Gambar 1.9	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021	1 - 17
Gambar 1.10	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kabupaten Bangka Barat per September Tahun 2022	1 - 20
Gambar 1.11	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Barat per September Tahun 2022	1 - 21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Esensi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen pemerintahan dalam rangka menuju pemerintahan yang baik. Sistem pengendalian ini merupakan instrumen bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa tujuan pemerintahan dapat diwujudkan melalui implementasi strategi pencapaiannya yang terencana dan terlaksana dengan baik.

Sebagai salah satu komponen SAKIP sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh entitas kinerja diamanatkan untuk menyusun perjanjian kinerja dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan dapat menjadi suatu komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia serta dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2022, maka selanjutnya dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Tahun 2022 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Diharapkan melalui Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ini, dapat menjadi komitmen dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Tahun 2022 dengan didukung oleh sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 2 Seri A);
13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 48 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 28 Seri E);
14. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 58 Seri E);
15. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 86 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 11 Seri A).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas program/kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk akumulasi kinerja yang terwujud dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari program/kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Maksud penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 adalah menciptakan tolok ukur kinerja berdasarkan hasil pengendalian untuk evaluasi kinerja pemerintah daerah di tahun berjalan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 adalah:

1. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pemerintah daerah; serta
2. sebagai wujud nyata komitmen pemerintah kepada masyarakat terkait kinerja pembangunan.

1.4 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

1.4.1 Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, luas wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk luas daratan di pulau utama ±284.886,05 ha, luas daratan di pulau-pulau kecil ± 214,85 ha sehingga luas total daratan di Kabupaten Bangka Barat ± 285.100,90 ha.

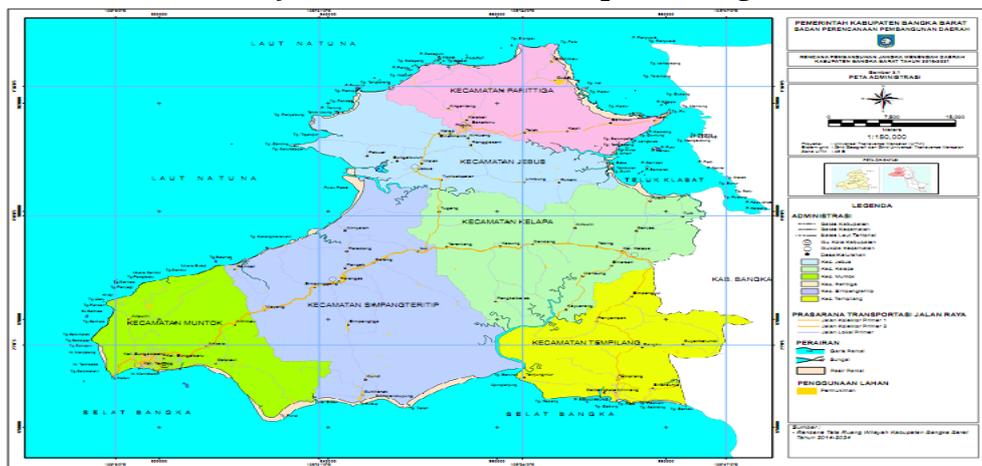
Secara geografis Kabupaten Bangka Barat terletak pada 105° 00' – 106° 00' Bujur Timur dan 01° 00' – 02° 10' Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;

- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 36 pulau-pulau kecil dengan luasan ± 214,85 ha dan memiliki kawasan pesisir yang cukup luas dengan panjang pantai sebesar 297,38 km.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bangka Barat



Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034

Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 kecamatan, 6 kelurahan, dan 60 desa. Jumlah kelurahan dan desa di setiap kecamatan relatif seimbang, dimana Kecamatan Kelapa memiliki jumlah desa dan kelurahan yang relatif paling banyak dibanding kecamatan lain.

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 6 (enam) kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sungaيداeng, Kelurahan Sungaibaru, Kelurahan Keranggan, Kelurahan Menjelang dan Kelurahan Kelapa.

Tabel 1.1
Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten
per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten
1.	Muntok	5 kelurahan, 4 desa	36.795,25	12,92
2.	Simpangteritip	13 desa	78.447,89	27,54
3.	Kelapa	1 kelurahan, 13 desa	59.140,76	20,76
4.	Tempilang	9 desa	39.019,21	13,70
5.	Jebus	11 desa	38.811,63	13,62
6.	Parittiga	10 desa	32.671,31	11,47
Total		6 kelurahan, 60 desa	284.886,05	100

Sumber : RTRW Kab. Bangka Barat Tahun 2014-2034

1.4.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat sampai dengan bulan Juni Tahun 2022 sebanyak 206.937 jiwa. Apabila dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Muntok memiliki jumlah penduduk tertinggi yaitu sejumlah 53.577 jiwa atau 25,89 persen dan Kecamatan Jebus dengan penduduk yang paling sedikit dengan jumlah penduduk 22.890 jiwa atau 11,06 persen.

Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat sampai dengan bulan Juni Tahun 2022 terdiri dari 106.552 jiwa laki-laki (51,49 persen) dan 100.385 jiwa perempuan (48,51 persen) meningkat dari Tahun 2021 yang terdiri dari 106.205 jiwa laki-laki (51,49 persen) dan 100.041 jiwa perempuan (48,51 persen). Untuk pembagian jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Bangka Barat Semester I Tahun 2022

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK		
		L	P	JUMLAH
1	Muntok	27.138	26.439	53.577
2	Simpangteritip	15.923	15.191	31.114
3	Jebus	11.831	11.059	22.890
4	Kelapa	18.215	16.736	34.951

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK		
		L	P	JUMLAH
5	Tempilang	14.942	13.663	28.605
6	Parittiga	18.503	17.297	35.800
TOTAL		106.552	100.385	206.937

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat, 2022

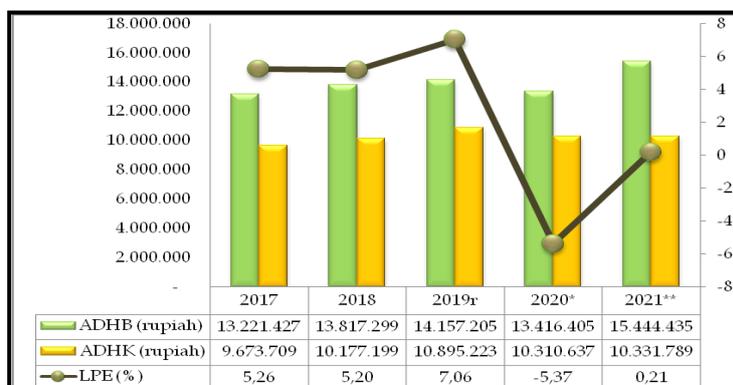
Masyarakat Kabupaten Bangka Barat merupakan masyarakat yang heterogen. Etnis yang ada mencakup Melayu, Tionghoa, Arab, Jawa, Madura, Bugis, Buton, serta beberapa suku dari daratan Pulau Sumatera. Penduduk Kabupaten Bangka Barat memeluk beberapa agama antara lain Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu dengan mayoritas penduduk adalah pemeluk agama Islam.

Kegiatan ekonomi penduduk yang dominan di Kabupaten Bangka Barat adalah pada sektor pertanian (subsektor perkebunan) dan sektor pertambangan. Penanganan penduduk usia produktif memang sangat diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja/kewirausahaan di sektor pertanian dan pertambangan dengan keterkaitan yang kuat dengan sektor ekonomi lainnya.

1.4.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) sampai saat ini masih digunakan untuk memantau perkembangan ekonomi suatu daerah.

Gambar 1.2
PDRB ADHB, ADHK dan LPE Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2017 – 2021



Keterangan : r) angka revisi

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat di pandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kabupaten Bangka Barat
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Persentase)

Kategori	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019 ^r	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,21	1,57	-0,10	3,53	0,01
B	Pertambangan dan Penggalian	2,41	0,48	1,39	-13,87	10,22
C	Industri Pengolahan	6,53	6,97	12,46	-7,00	-4,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,17	8,55	15,06	19,30	8,54
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,59	0,01	2,01	7,50	3,97
F	Konstruksi	7,05	7,23	3,85	-1,46	1,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,35	4,53	2,55	-6,21	5,94
H	Transportasi dan Pergudangan	7,85	6,54	3,34	-13,37	8,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,83	2,80	3,70	-0,65	6,29
J	Informasi dan Komunikasi	8,43	10,51	12,55	18,44	5,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,04	6,55	7,14	-0,44	5,36
L	Real Estate	5,05	7,29	1,57	4,91	4,41
M,N	Jasa Perusahaan	4,10	4,49	0,37	-9,11	4,09
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,80	8,08	6,08	-0,63	4,64
P	Jasa Pendidikan	9,76	9,12	6,01	-0,76	1,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	8,90	7,52	7,37	1,07	9,31

Kategori	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019 ^r	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Sosial					
R,S,T,U	Jasa lainnya	7,80	4,13	4,48	-4,69	2,20
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,26	5,20	7,06	-5,37	0,21

Keterangan : r) angka revisi

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 meningkat. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 mencapai Rp 10,33 triliun, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang bernilai sebesar Rp 10,31 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi sebesar 0,21 persen, sejalan dengan meningkatnya produksi di beberapa sektor lapangan usaha di tahun 2021. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Selama tahun 2021, hampir seluruh kategori lapangan usaha tercatat tumbuh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hanya satu sektor saja yang tercatat mengalami kontraksi, yaitu kategori Industri Pengolahan. Kategori ini tercatat mengalami kontraksi yang cukup dalam, yaitu sebesar 4,52 persen. Sementara itu, kategori lapangan usaha dengan laju pertumbuhan PDRB terbesar di antaranya adalah kategori Pertambangan dan Penggalian, Jasa Kesehatan, dan Transportasi dan Pergudangan. Kategori Pertambangan dan Penggalian tercatat tumbuh cukup signifikan, yaitu sebesar 10,22 persen di tahun 2021. Kemudian disusul oleh kategori Jasa Kesehatan yang tumbuh sebesar 9,31 persen. Selain itu, kategori Transportasi dan Pergudangan juga tumbuh cukup besar di tahun 2021, yaitu sebesar 8,28 persen.

2) Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh program dan sasaran yang telah

dicapai pada satu periode tertentu. Peranan setiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Melalui data peranan masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, dapat dilihat seberapa jauh keberhasilan dari kebijakan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, analisis ini dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Tabel 1.4
Kontribusi Sektor terhadap PDRB (ADHB) Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017-2021 (Persentase)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019 ^r	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,11	12,06	11,34	13,25	12,45
B	Pertambangan dan Penggalian	10,71	9,48	8,31	7,50	8,71
C	Industri Pengolahan	42,20	44,03	45,61	42,99	45,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,07	0,09	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	6,66	7,22	7,51	7,84	7,16
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,00	14,55	14,06	14,07	13,27
H	Transportasi dan Pergudangan	0,93	0,96	0,99	0,93	0,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,17	1,20	1,26	1,40	1,32
J	Informasi dan Komunikasi	0,31	0,33	0,37	0,45	0,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,40	0,42	0,45	0,47	0,45
L	Real Estate	2,01	2,09	2,08	2,33	2,14
M,N	Jasa Perusahaan	0,14	0,15	0,15	0,15	0,14
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,45	4,52	4,73	5,16	4,71

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2017	2018	2019 ^r	2020*	2021**
P	Jasa Pendidikan	1,79	1,82	1,91	2,11	1,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,79	0,85	0,91	0,88
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,30	0,31	0,32	0,34	0,31
PDRB ADHB		100	100	100	100	100

Keterangan : r) angka revisi

*) angka sementara

***) angka sangat sementara

Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

Selama lima tahun terakhir (2017-2021), struktur perekonomian Kabupaten Bangka Barat didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, diantaranya; lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; lapangan usaha Konstruksi; serta lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan. Dilihat dari nilai kontribusi yang dihasilkan, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan serta lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran. Kontribusi yang dihasilkan kategori ini menyumbang sebesar 45,13 persen dan 13,27 persen terhadap total PDRB ADHB. Selanjutnya, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mempunyai peranan sebesar 12,45 persen, disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 8,71 persen serta Lapangan usaha Konstruksi memiliki peranan sebesar 7,16 persen.

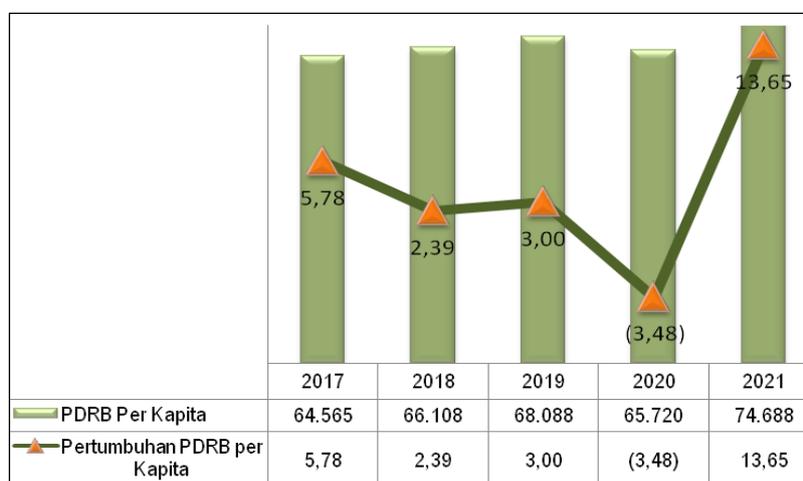
Peranan lapangan usaha Industri Pengolahan cenderung mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2017 menjadi sebesar 42,20 persen menjadi 44,03 persen di tahun 2018. Kemudian kembali naik pada tahun 2019 menjadi sebesar 45,61 persen dan tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai kontribusinya sebesar 42,99 Meskipun demikian di tahun 2021 nilai kontribusinya kembali meningkat menjadi 45,13 persen.

3) PDRB Perkapita

Indikator ini merupakan salah satu ukuran makro yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, yaitu berapa nilai tambah yang dapat dinikmati setiap penduduk secara rata-rata dalam satu tahun. PDRB perkapita

diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB perkapita tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

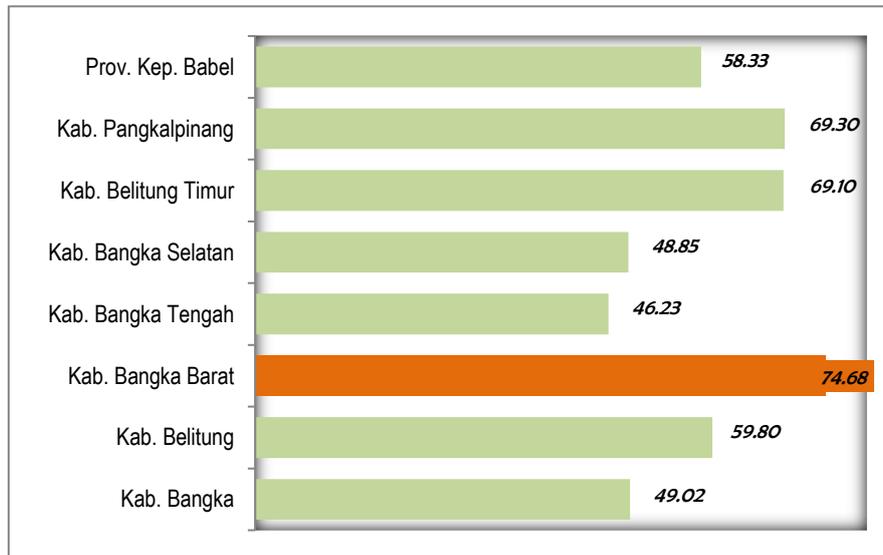
Gambar 1.3
PDRB Perkapita Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021 (Ribuan Rupiah)



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022

PDRB perkapita Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020, PDRB perkapita Kabupaten Bangka Barat sempat mengalami penurunan, menjadi 65,72 juta rupiah. Sementara di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 74,68 juta rupiah.

Gambar 1.4
PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/Kota
Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 (Juta Rupiah)



Sumber : Kabupaten Bangka Barat Dalam Angka, 2022.

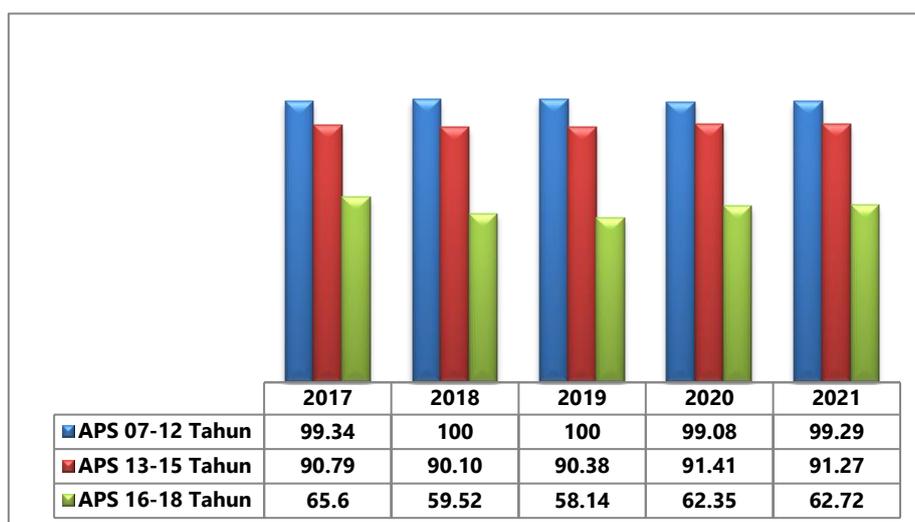
Sementara jika dibandingkan dengan PDRB perkapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Tahun 2021 PDRB perkapita Kabupaten Bangka Barat memiliki angka yang tertinggi. Secara keseluruhan, hal ini menandakan bahwa perekonomian dan tingkat kemakmuran penduduk Kabupaten Bangka Barat secara umum lebih baik dari pada kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.4.4 Kondisi Sosial Budaya

1) Pendidikan

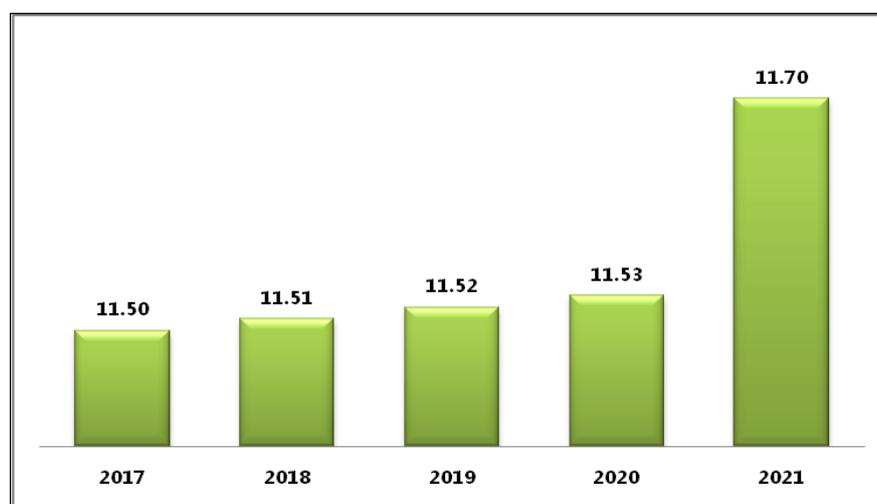
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Pencapaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator pendidikan diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Gambar 1.5
Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021 (Persentase)



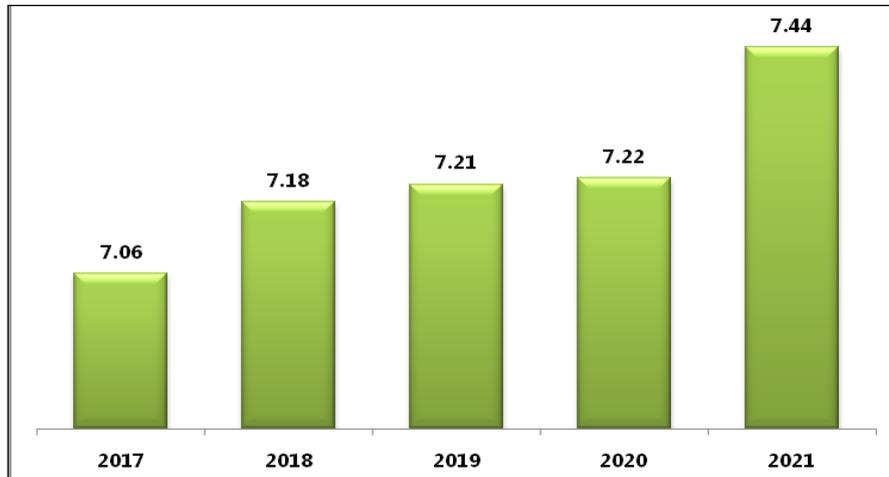
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2022

Gambar 1.6
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021 (Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2022

Gambar 1.7
Angka Rata - Rata Lama Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021 (Tahun)



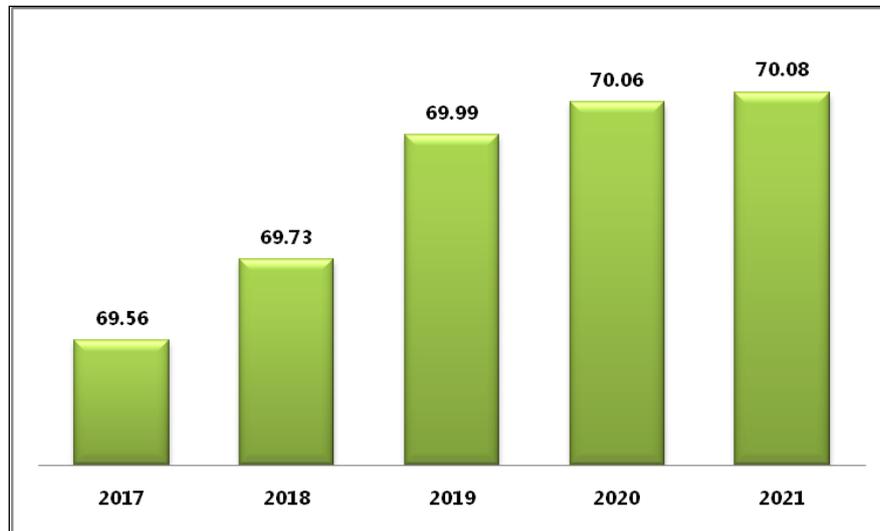
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2022

2) Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Gambaran pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Bangka Barat antara lain dapat dilihat dari perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH).

AHH merupakan perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah, pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHH penduduk pada saat lahir dapat menggambarkan derajat kesehatan penduduk, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Selama lima tahun terakhir, AHH Kabupaten Bangka Barat terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa harapan seorang bayi yang baru lahir untuk dapat hidup lebih lama menjadi semakin tinggi. Pada tahun 2021, AHH penduduk Kabupaten Bangka Barat mencapai 70,08 tahun. Jika dilihat perkembangannya AHH di Kabupaten Bangka Barat terus meningkat dari Tahun 2017 hingga 2021. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat.

Gambar 1.8
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 – 2021 (Tahun)



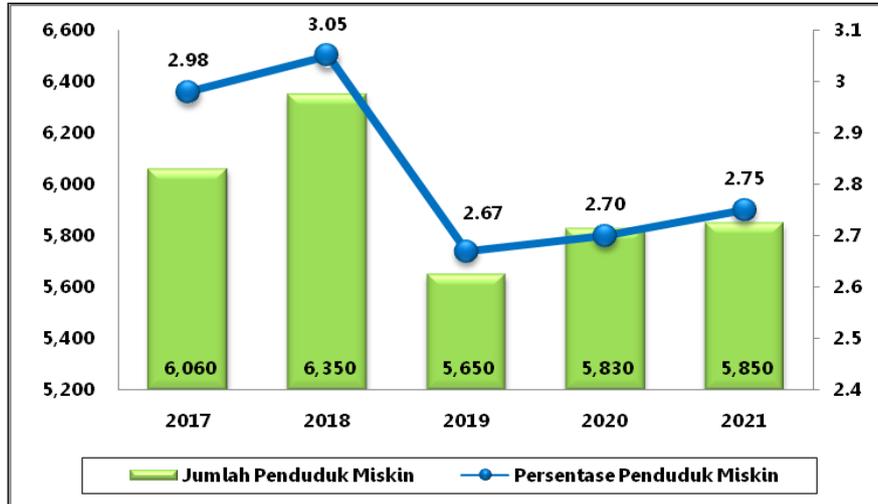
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2022

3) Penduduk Miskin

Berdasarkan publikasi dari BPS Kabupaten Bangka Barat, data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2021 adalah 5.850 Jiwa atau 2,75%. Jumlah penduduk miskin tersebut meningkat jika dibandingkan Tahun 2020 dengan jumlah sebanyak 5.830 jiwa atau 2,70%. Pandemi *Covid-19* yang terjadi sepanjang Tahun 2020 sampai dengan 2021 menyebabkan berbagai kegiatan penduduk terhambat, terjadi penurunan tingkat kesehatan masyarakat, peningkatan angka pengangguran, dan penurunan daya beli masyarakat akibat dari penurunan pendapatan, serta penurunan pertumbuhan ekonomi (kontraksi) sehingga mempengaruhi angka kemiskinan.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Bangka Barat memiliki jumlah dan persentase penduduk miskin yang paling rendah. Sementara jika dibandingkan dengan kondisi di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan nasional dengan jumlah penduduk miskin provinsi yaitu sebanyak 72.710 jiwa atau 4,90% dan secara nasional dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 27.542.770 jiwa atau 10,14%, maka kondisi kemiskinan di Kabupaten Bangka Barat jauh lebih rendah.

Gambar 1.9
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 - 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bangka Barat, 2022

1.4.5 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat antara lain sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Badan/Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;

2. Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
5. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;

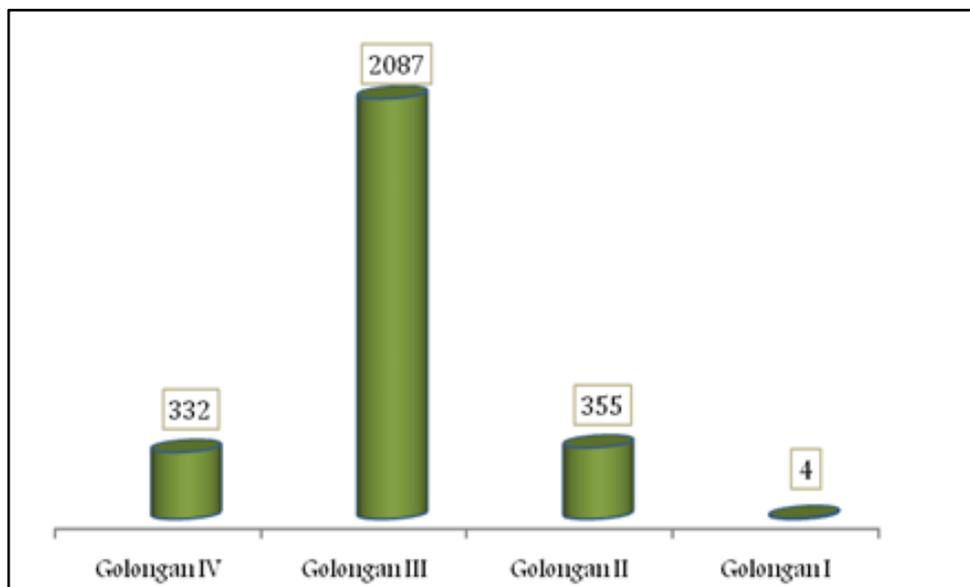
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
 16. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
 2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yaitu sub urusan bencana (ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah).
- f. Urusan Kewilayahan terdiri dari:
1. Kecamatan Muntok dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Simpangteritip dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Jebus dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Parittiga dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Kelapa dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Tempilang dengan Tipe A.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan dan penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana

yang jelas dan transparan diawali oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholders*), serta adanya pengawasan secara internal maupun eksternal.

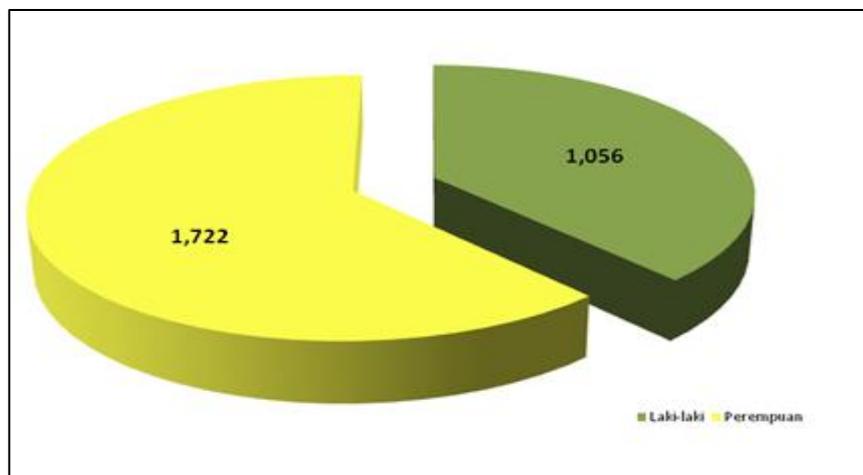
Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan sampai dengan Bulan September 2022 jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 2.778 orang.

Gambar 1.10
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan
Kabupaten Bangka Barat per September Tahun 2022



Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Barat, 2022

Gambar 1.11
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Bangka Barat per September Tahun 2022



Sumber : BKPSDMD Kab. Bangka Barat, 2022

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum Kabupaten Bangka Barat, serta sistematika penyusunan.

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta target perubahan perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022.

BAB III : PENUTUP

LAMPIRAN

- PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022
- PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya serta anggaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022. Melalui Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan di Tahun 2022.

2.1. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2022

Sesuai dengan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merevisi Tema pembangunan yang sebelumnya “PENGUATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAHAN DAERAH” menjadi “MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR, PEREKONOMIAN BERBASIS KEUNGGULAN DAERAH, PEMBANGUNAN SUMBERDAYA MANUSIA YANG DIDUKUNG TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN”. Penetapan tema ini memperhatikan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, dinamika dan realita kondisi umum daerah, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, dan Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022.

Berdasarkan tema tersebut maka program/kegiatan/subkegiatan strategis Tahun 2022 lebih diarahkan pada upaya-upaya penguatan pelayanan dasar, perekonomian, pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Tema yang sudah ditetapkan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan dengan memperhatikan arah kebijakan dan fokus pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 untuk tahun perencanaan 2022, dan permasalahan serta isu strategis yang berhasil di inventarisir pada saat penyusunan Perubahan RKPDP Tahun 2022.

Adapun prioritas pada Perubahan RKPDP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; serta
3. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penetapan prioritas pembangunan dalam Perubahan RKPDP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 berdasarkan beberapa hal, yaitu:

1. percepatan pemulihan ekonomi daerah Pasca Pandemi Covid-19, mengingat laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat tahun 2021 memiliki capaian yang rendah yaitu 0,21 persen;
2. pembayaran premi asuransi kesehatan dalam rangka 100% UHC, khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bangka Barat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional berupa premi BPJS Kelas III;
3. upaya percepatan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bangka Barat yang saat ini masih rendah dengan kategori buruk dengan nilai 49,60, dimana fokus percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi ini selaras dengan misi ketiga Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yaitu “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”.

2.2. TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2022

Adapun target indikator makro yang telah ditetapkan pada Perubahan RKPDP 2022 setelah memperhatikan capaian indikator makro berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2021 serta memperhatikan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Perubahan Target Indikator Makro
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

No.	Indikator Makro	Target 2022	Realisasi 2021	Target Perubahan 2022
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	8,90 – 10,32	0,21	4,91
2.	Indeks Pembangunan Manusia	69,27 – 69,62	69,60	69,62
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	2,82 3,12	2,75	2,85
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,57 – 3,64	3,83	3,64
5.	Pendapatan Per Kapita (Rp. ribu)	77.570 – 80.010	74.688	77.570

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun suatu kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja pemerintah untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 48 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Penghitungan
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (AHB)	PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (n) PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (n-1) (dibagi) PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (n-1) (dikali) 100
		Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHB)	PDRB lapangan usaha Industri Pengolahan – PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (n-1) (dibagi) PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (n-1) (dikali) 100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Penghitungan
		Kontribusi sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB)	Nilai PDRB sektor pariwisata (dibagi) total PDRB (dibagi) 100
		Kontribusi sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB (ADHB)	Nilai PDRB sektor perdagangan dan jasa (dibagi) total PDRB (dikali) 100
2.	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal	Nilai Investasi tahun n (dikurangi) nilai investasi tahun n-1 (dibagi) nilai investasi tahun n-1 (dikali) 100
3.	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks Konektivitas	Jumlah jaringan jalan yang menghubungkan kota (dibagi) jumlah desa/kelurahan
		Indeks Bangunan Gedung	Perhitungan berdasarkan kualitas bangunan gedung
4.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$(0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKTL)$
		Persentase Wilayah Perkotaan yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	Jumlah desa/kelurahan di wilayah perkotaan yang mendapat layanan pengelolaan sampah (dibagi) jumlah seluruh desa/kelurahan di wilayah perkotaan (dikali) 100
		Indeks Resiko Bencana	Bahaya (dikali) jumlah desa rawan bencana (dibagi) jumlah desa tangguh bencana
5.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Jumlah penduduk miskin (dibagi) total penduduk (dikali) 100
6.	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Jumlah pengangguran (dibagi) jumlah angkatan kerja (dikali) 100
7.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Rata rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$
		Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	Jumlah SD dan SMP terakreditasi A (dibagi) total SD dan SMP (dikali) 100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Formulasi Penghitungan
8.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik
		Prevalensi Stunting	Jumlah Balita Stunting (dibagi) jumlah balita (dikali) 100
9.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender	IPM perempuan (dibagi) IPM laki-laki
		Status Kabupaten Layak Anak	Hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10.	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Hasil survei terhadap dimensi: taat hukum, kepedulian antarsesama, dan kepedulian terhadap lingkungan
11.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
		Opini BPK	Kesimpulan hasil evaluasi BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
		Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Penilaian dilakukan oleh APIP Pemerintah Daerah/BPKP dengan merujuk pada Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
		Indeks Profesionalitas ASN	$(\text{nilai dimensi kualifikasi} \times \text{bobot } 25) + (\text{nilai dimensi kompetensi} \times \text{bobot } 40) + (\text{nilai dimensi kinerja} \times \text{bobot } 30) + (\text{nilai dimensi disiplin} \times \text{bobot } 5) /$ Berpedoman pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (atau perubahannya)
12.	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Berdasarkan rata-rata nilai hasil survei yang dilakukan oleh unit pelayanan publik dengan berpedoman pada Permen PAN RB RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (atau perubahannya)
13.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	Pendapatan Asli Daerah [dibagi]total pendapatan [dikali] 100

Sumber : Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 48 Tahun 2021

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama tersebut, telah ditetapkan indikator sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai dan menjadi target dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

2.4. TARGET INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022

2.4.1. Indikator Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2022

Indikator Tujuan digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Target Indikator Tujuan Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

No.	Tujuan Pembangunan	Indikator Kinerja	Target Perubahan RKPD 2022
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,91%
2.	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	12.605 Ribu rupiah
3.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	69,62
4.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Kurang
5.	Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	0,58

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

2.4.2. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

Agar tujuan pembangunan daerah dapat lebih terarah dan dapat dicapai, maka ditetapkan sasaran pembangunan beserta target indikator pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah Tahun 2022 merujuk pada sasaran pembangunan yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Untuk

penentuan target indikator sasaran pembangunan Tahun 2022, mempertimbangkan capaian target indikator beberapa tahun sebelumnya dan sumber daya yang dimiliki Kabupaten Bangka Barat. Berikut dijabarkan target sasaran pembangunan daerah Tahun 2022 beserta perubahannya sesuai dengan perubahan RKPD Tahun 2022.

Tabel 2.4.
Target Indikator Sasaran Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

No.	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja	Target RPJMD		Target Perubahan RKPD 2022
			Satuan	Nilai	
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (ADHB)	%	5,50	5,50
		Pertumbuhan PDRB kategori lapangan usaha industri pengolahan (ADHB)	%	5,70	5,70
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	%	2,38	2,38
		Kontribusi sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB (ADHB)	%	27,03	27,03
2.	Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan realisasi penanaman modal	Milyar rupiah	805	805
3.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Indeks Konektivitas	Nilai	0,70	0,70
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang	Sedang
4.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	70,91	70,91
		Persentase wilayah perkotaan yang terlayani pengelolaan persampahan	%	41,18	41,18
		Indeks Resiko Bencana	Kategori	Tinggi	Tinggi
5.	Menurunnya angka kemiskinan	Angka kemiskinan	%	2,70	2,85

No.	Sasaran Pembangunan	Indikator Kinerja	Target RPJMD		Target Perubahan RKPDP 2022
			Satuan	Nilai	
6.	Menurunnya angka pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,94	3,64
7.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,25	7,59
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,54	11,72
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	%	24,32	24,32
8.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,41	70,41
		Prevalensi <i>Stunting</i>	%	8,75	8,75
9.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,67	90,67
		Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Pratama	Pratama
10.	Meningkatnya kesalehan sosial masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	Kategori	Cukup	Cukup
11.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	70,98	70,00
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP
		Maturitas SPIP	Tingkat maturitas	Berkembang	Berkembang
		Indeks SPBE	kategori	Cukup	Cukup
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64,60	64,60
12.	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,52	81,52
13.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	%	8,87	8,87

Sumber : Perubahan RKPDP Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

2.5 PERUBAHAN APBD TAHUN 2022

Dalam rangka memaksimalkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja, maka didukung oleh penganggaran melalui program, kegiatan dan subkegiatan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2022

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat
Tahun Anggaran 2022.

Tabel 2.5
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH	905.019.626.010,00	933.538.465.165,00	28.518.839.155,00	3,15
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	81.686.938.010,00	104.667.737.165,00	22.980.799.155,00	28,13
4.1.01	Pajak Daerah	30.163.590.000,00	30.163.590.000,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	9.354.920.000,00	10.173.665.155,00	818.745.155,00	8,75
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.115.000.000,00	5.115.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	37.053.428.010,00	59.215.482.010,00	22.162.054.000,00	59,81
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	813.532.688.000,00	814.070.728.000,00	538.040.000,00	0,07
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	712.829.902.000,00	739.880.989.732,00	27.051.087.732,00	3,79
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	100.702.786.000,00	74.189.738.268,00	-26.513.047.732,00	26,33
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.800.000.000,00	14.800.000.000,00	5.000.000.000,00	51,02
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.800.000.000,00	9.800.000.000,00	0,00	0,00
5	BELANJA DAERAH	1.039.923.539.645,00	947.985.153.546,00	-91.938.386.099,00	8,84
5.1	BELANJA OPERASI	732.433.951.076,00	726.260.491.238,00	-6.173.459.838,00	0,84
5.1.01	Belanja Pegawai	355.244.510.469,00	354.503.897.854,00	-740.612.615,00	0,21
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	349.398.371.235,00	343.981.727.392,00	-5.416.643.843,00	1,55
5.1.05	Belanja Hibah	22.606.963.772,00	20.021.276.000,00	-2.585.687.772,00	11,44
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.184.105.600,00	7.753.589.992,00	2.569.484.392,00	49,56
5.2	BELANJA MODAL	190.865.988.569,00	106.884.632.793,00	-83.981.355.776,00	44,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.062.417.142,00	33.586.669.463,00	4.524.252.321,00	15,57
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.417.976.099,00	45.090.309.999,00	-69.327.666.100,00	60,59
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	40.612.172.328,00	25.252.420.250,00	-15.359.752.078,00	37,82
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.773.423.000,00	2.955.233.081,00	-3.818.189.919,00	56,37
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.335.000.000,00	765.075.000,00	-4.569.925.000,00	85,66
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.335.000.000,00	765.075.000,00	-4.569.925.000,00	85,66
5.4	BELANJA TRANSFER	111.288.600.000,00	114.074.954.515,00	2.786.354.515,00	2,50
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.951.851.000,00	4.033.725.515,00	81.874.515,00	2,07

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	107.336.749.000,00	110.041.229.000,00	2.704.480.000,00	2,52
	SURPLUS / (DEFISIT)	-134.903.913.635,00	-14.446.688.381,00	120.457.225.254,00	89,29
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	141.903.913.635,00	14.446.688.381,00	-127.457.225.254,00	89,82
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	99.803.913.635,00	14.346.688.381,00	-85.457.225.254,00	85,63
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	42.000.000.000,00	0,00	-42.000.000.000,00	100,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000,00	0,00	-7.000.000.000,00	100,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00	-	-7.000.000.000,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	134.903.913.635,00	14.446.688.381,00	-120.457.225.254,00	89,29
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	

Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka Barat, 2022

Dukungan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat sebanyak 124 program pembangunan dengan total anggaran sebesar Rp947.985.153.546,00.

Tabel 2.6
Program Pendukung Sasaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	265.085.200,00
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	852.192.620,00
	Program Penyuluhan Pertanian	104.183.800,00
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	173.557.000,00
	Program Perizinan Usaha Pertanian	18.326.600,00
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	228.131.015,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	1.137.485.200,00

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
	(SDA)	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	45.080.000,00
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	90.730.000,00
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	129.874.000,00
	Program Pengembangan UMKM	170.089.000,00
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	120.406.000,00
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	115.059.000,00
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	487.500.000,00
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	223.775.260,00
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	22.740.000,00
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	21.300.000,00
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	63.204.900,00
	Program Pengelolaan Pelayaran	23.690.700,00
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.469.619.764,00
	Program Pemasaran Pariwisata	290.186.650,00
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	642.275.000,00
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	7.740.900,00
	Program Pengembangan Kebudayaan	797.011.640,00
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	139.148.300,00
	Program Pembinaan Sejarah	197.687.405,00
	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	312.731.770,00
	Program Pengelolaan Permuseuman	33.220.000,00
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	4.110.000,00
	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	421.039.080,00
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	327.800.000,00
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	51.850.000,00
	Program Pengembangan Ekspor	136.125.000,00
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	95.803.800,00
Meningkatnya Peran Penanaman Modal Pada Perekonomian Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	7.075.000,00
	Program Pelayanan Penanaman Modal	99.295.000,00

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	387.645.000,00
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	408.111.140,00
Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Program Penyelenggaraan Jalan	28.638.935.950,00
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.989.502.400,00
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	1.482.586.000,00
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	109.493.500,00
	Program Penataan Bangunan Gedung	26.230.000.000,00
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	444.875.200,00
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	84.489.575,00
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	140.258.960,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	35.405.000,00
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	32.943.000,00
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	273.423.000,00
	Program Pengelolaan Persampahan	9.279.905.480,00
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	709.980.000,00
	Program Penanggulangan Bencana	1.664.000.000,00
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	535.440.750,00
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.372.992.820,00
	Menurunnya Angka Kemiskinan	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
Program Rehabilitasi Sosial		2.761.257.675,00
Program Penanganan Bencana		249.410.000,00
Program Pemberdayaan Sosial		481.500.000,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		4.302.425.200,00
Program Penanganan Kerawanan Pangan		115.273.579,00
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		211.319.190,00
Program Pengawasan Keamanan Pangan		70.994.540,00
Program Pengembangan Perumahan		374.920.000,00
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		1.218.509.200,00
Program Kawasan Permukiman		1.290.000.000,00
Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)		136.440.000,00
Menurunnya Angka Pengangguran		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	6.218.500,00
	Program Hubungan Industrial	45.477.550,00

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	94.803.983.800,00	
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	20.930.000,00	
	Program Pembinaan Perpustakaan	202.921.415,00	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Peorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	79.785.798.864,00	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	229.112.000,00	
	Program Pengendalian Penduduk	131.985.660,00	
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.806.183.324,00	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	408.994.000,00	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.994.185.600,00	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	7.965.073.800,00	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.573.636.000,00	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	7.227.035.300,00	
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.340.830.750,00	
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	216.003.347,00
		Program Perlindungan Perempuan	124.744.000,00
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)		124.667.000,00	
Program Perlindungan Khusus Anak		506.021.000,00	
Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.103.020.500,00	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	350.000.000,00	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	746.470.000,00	
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.504.820.010,00	
	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	424.515.000,00	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	554.695.300,00	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.490.369.750,00	
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	46.775.100,00	
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	182.341.600,00	
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	193.105.450,00	

SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	ANGGARAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	263.218.845,00	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	475.357.334.185,00	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	361.671.892,00	
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	813.023.400,00	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	460.764.750,00	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	156.295.000,00	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	116.826.102.533,00	
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	718.551.150,00	
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.374.279.900,00	
	Program Perumusan Kebijakan, Pedampingan dan Asistensi	359.572.000,00	
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	18.342.112.858,00	
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	39.755.000,00	
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	29.604.740,00	
	Program Pengelolaan Arsip	11.584.925,00	
	Program Aplikasi Informatika	2.262.819.000,00	
	Program Informasi dan Komunikasi Publik	706.129.780,00	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.076.778.600,00	
	Program Kepegawaian Daerah	1.175.149.218,00	
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	634.513.650,00	
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah	Program Pendaftaran Penduduk	287.110.000,00
		Program Pencatatan Sipil	34.313.300,00
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		27.736.700,00	
Program Pengelolaan Profil Kependudukan		10.090.000,00	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		1.046.467.100,00	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		201.717.700,00	
Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat		749.053.500,00	
Program Administrasi Pemerintahan Desa		3.370.417.000,00	
Program Perekonomian dan Pembangunan		315.794.763,00	
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.354.616.800,00
	Program Perekonomian dan Pembangunan	367.250.874,00	
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	16.270.000,00	
Jumlah Belanja Daerah		947.985.153.546,00	

BAB III PENUTUP

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Reformasi Nomor 54 tahun 2014, bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan (perubahan program, kegiatan, subkegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022.

Melalui kinerja yang diperjanjikan, diharapkan dapat memperbaiki manajemen pembangunan untuk menjujutata pemerintahan yang baik serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Setiap target kinerja akan semaksimal mungkin dicapai melalui sinergitas dan bantuan dari berbagai pihak baik dari elemen pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat juga peran serta pihak swasta dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja di tahun 2022.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SUKIRMAN, S.H.

Jabatan : BUPATI BANGKA BARAT

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muntok, 19 Oktober 2022

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN, S.H.

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022**

NO.	SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SATUAN	NILAI
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (AHB)	Persentase	5,50
		Pertumbuhan PDRB Kategori Lapangan Usaha Industri Pengolahan (ADHB)	Persentase	5,70
		Kontribusi sektor Pariwisata Terhadap PDRB (ADHB)	Persentase	2,38
		Kontribusi sektor Perdagangan dan Jasa Terhadap PDRB (ADHB)	Persentase	27,03
2	Meningkatnya Peran Penanaman Modal pada Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Realisasi Penanaman Modal	Milyar Rupiah	805
3	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks Konektivitas	Nilai	0,70
		Indeks Bangunan Gedung	Kategori	Sedang
4	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Nilai	70,91
		Persentase Wilayah Perkotaan yang Terlayani Pengelolaan Persampahan	Persentase	41,18
		Indeks Resiko Bencana (IRB)	Kategori	Tinggi
5	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	Persentase	2,85
6	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persentase	3,64
7	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Rata rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,59
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,72
		Persentase Sekolah Terakreditasi A	Persentase	24,32
8	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	70,41
		Prevalensi Stunting	Persentase	8,75
9	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	90,67
		Status Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kategori	Pratama
10	Meningkatnya Kesalehan Sosial Masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial (IKS)	Kategori	Cukup
11	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	70,00
		Opini BPK	Opini	WTP
		Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas	Berkembang
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Kategori	Cukup
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	64,60
12	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81,52
13	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	Persentase	8,87

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 475.357.334.185
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp 94.803.983.800
3	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp 20.930.000
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 79.785.798.864
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 7.994.185.600
6	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 229.112.000
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 408.994.000
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Rp 4.573.636.000
9	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rp 2.510.478.020
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Rp 7.965.073.800
11	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rp 709.980.000
12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rp 26.230.000.000
13	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rp 444.875.200
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rp 28.638.935.950
15	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rp 84.489.575
16	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rp 408.111.140
17	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rp 374.920.000
18	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Rp 1.290.000.000
19	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rp 1.218.509.200
20	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Rp 136.440.000
21	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp 4.504.820.010
22	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Rp 535.440.750
23	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Rp 1.664.000.000
24	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Rp 481.500.000
25	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp 2.761.257.675
26	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Rp 2.445.000.000
27	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp 249.410.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
28	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp 322.973.000
29	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 6.218.500
30	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp 45.477.550
31	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rp 216.003.347
32	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rp 124.744.000
33	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Rp 124.667.000
34	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Rp 506.021.000
35	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp 211.319.190
36	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp 115.273.579
37	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Rp 70.994.540
38	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Rp 1.482.586.000
39	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Rp 109.493.500
40	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 140.258.960
41	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp 273.423.000
42	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp 35.405.000
43	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp 32.943.000
44	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp 9.279.905.480
45	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rp 287.110.000
46	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rp 34.313.300
47	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Rp 27.736.700
48	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Rp 10.090.000
49	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Rp 16.270.000
50	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Rp 3.370.417.000
51	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Rp 749.053.500
52	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rp 131.985.660
53	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rp 1.806.183.324
54	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Rp 1.340.830.750

NO	PROGRAM	ANGGARAN
55	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rp 1.989.502.400
56	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Rp 23.690.700
57	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp 706.129.780
58	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Rp 2.262.819.000
59	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp 487.500.000
60	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp 120.406.000
61	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp 115.059.000
62	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	Rp 129.874.000
63	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp 170.089.000
64	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp 7.075.000
65	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp 99.295.000
66	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp 387.645.000
67	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Rp 746.470.000
68	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Rp 7.227.035.300
69	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Rp 350.000.000
70	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp 156.295.000
71	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp 39.755.000
72	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Rp 797.011.640
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Rp 139.148.300
74	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Rp 197.687.405
75	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Rp 312.731.770
76	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Rp 33.220.000
77	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rp 202.921.415
78	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Rp 4.110.000
79	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Rp 11.584.925
80	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Rp 29.604.740
81	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Rp 45.080.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN
82	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Rp 90.730.000
83	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rp 63.204.900
84	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Rp 1.469.619.764
85	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rp 290.186.650
86	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Rp 7.740.900
87	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Rp 642.275.000
88	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp 265.085.200
89	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp 852.192.620
90	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp 228.131.015
91	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp 173.557.000
92	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp 18.326.600
93	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp 104.183.800
94	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Rp 421.039.080
95	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Rp 327.800.000
96	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Rp 51.850.000
97	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Rp 136.125.000
98	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Rp 95.803.800
99	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp 223.775.260
100	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Rp 22.740.000
101	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp 21.300.000
102	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Rp 6.737.534.150
103	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Rp 683.045.637
104	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Rp 18.342.112.858
105	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 361.671.892
106	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 813.023.400
107	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp 116.826.102.533
108	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp 718.551.150

NO	PROGRAM	ANGGARAN	
109	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rp	1.354.616.800
110	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp	1.175.149.218
111	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp	1.076.778.600
112	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp	460.764.750
113	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Rp	1.374.279.900
114	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Rp	359.572.000
115	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp	1.046.467.100
116	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp	4.302.425.200
117	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp	424.515.000
118	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp	263.218.845
119	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp	201.717.700
120	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rp	554.695.300
121	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rp	1.490.369.750
122	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Rp	46.775.100
123	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Rp	182.341.600
124	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Rp	193.105.450
TOTAL BELANJA		Rp	947.985.153.546

Muntok, 19 Oktober 2022

BUPATI BANGKA BARAT,



H. S. HIRMAN, S.H.